

Akan tetapi tentang kedemokrasian ini tidak usah dipandang kan siasat dan selidiknya, karena kita dari semula sudah mendapat kesan, bahwa Negara2 itu mesti ditelorkan. Sedjarah Negara Djawa Barat mulai dari Kartalegawa affairs membuktikan kedjurusan itu. Politik Belanda yang berdjalan sendiri, melompat dari satu fait-accompli ke lain fait-accompli, membentuk Negara2 dalam daerah de facto Republik, tidak dibenarkan oleh Komisi Tiga Negara dan Republik telah memajukan protesnya terhadap politik fait-accompli itu di Dewan Keamanan, dengan alasan, bahwa Belanda telah melangkahi persetujuan Renville karena bermaksud hendak mendahului atau mem-fait accomplan, mendahului atau menjerbob keadaan, yang sebetulnya mesti dibentuk bersama sesudahnya ber langsung plebisit atau pungutan suara rakyat.

Djuga diterangkan, bahwa tjara pemilihan anggota untuk konvensi2 Djawa Barat I, II dan III, adalah tidak demokratis, sedang perdjalanannya sidangpun setjara diktatorial. Kesan yang diperdapat dari persidangan Djawa Barat I, II dan III, ialah bahwa Negara Djawa Barat, biar bagaimanapun juga mesti berdiri, kesan mana lebih njata lagi, apabila dihubungkan dengan usaha pihak Belanda sewaktu Kartalegawa ditondjolkkan kemuka.

Apakah tindakan yang diambil oleh Komisi Tiga Negara dalam perkara peneloran Negara2 itu, belum dapat dikatakan, akan tetapi soal ini telah dibicarakan, dan sedang dibicarakan di Lake Success. Orang masih ingat, bahwa Van Kleeffens di Dewan Keamanan telah mengusulkan, supaya soal Indonesia ditarik dari Dewan itu dan diserahkan saja kepada perundingan antara Djakarta dengan Djakarta, akan tetapi usulnya itu tidak diterima oleh Dewan Keamanan, karena Komisi Tiga Negara merasa berkewajiban yang sungguh, untuk ikut mengawasi pembentukan satu Negara Indonesia yang betul merdeka dan betul berdaulat, bukan satu Negara yang hanya di namanya saja begitu (Negara Boneka).

Orang luar negeri djuga mengeriti, bahwa pokok soal Indonesia yang tunggal, ialah kemerdekaan bangsa Indonesia dan kedaulatannya dan hal itu telah didjandjikan oleh Belanda dengan disebutkan tanggalnya yakni satu Djanuari 1949, disertakan lagi dengan sembojan „met of vander Republik“, ertinya walaupun Republik tidak ikut, namun Negara Indonesia Serikat akan didirikan djuga, hal mana bagi Komisi Tiga Negara menjadi alasan untuk mempertauikan kedua pendirian itu.

Kalau Belanda mau djalan sendiri djuga, dengan menelorkan Negara bangsa2 dengan daerah2 istimewa dalam daerah de facto Republik, rakjat djanganlah terlewat oleh politik fait accompli itu, sebab yang pokok soal ialah kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia Raja seluruhnya. Keinginan rakjat untuk mempunyai kedaulatan yang nasional dan yang demokratis itu tidak dapat dipatahkan atau dilenjakkan oleh peneloran berbagai2 negara dan daerah2 istimewa. Dimana2 ada pemerintahan Belanda atas daerah lain kelihatan keinginan itu. Barusan kenyataan hal itu di Suriname, Curacao dan Aruba, yang djuga menuntut djandjij Belanda dan pada waktu diadakan dengeri Belanda sidang untuk merundingkan soal kemerdekaan Aruba, Curacao dan Suriname itu pihak Belanda mempertunjukkan sikap yang masih kolot dan tidak suka madju melompat, hanya sangkutkan soal kemerdekaan Antillen itu pada komisi, separeh dari djumlah wakil Antillen itu meninggalkan persidangan dan di Aruba, Curacao dan Suriname diadakan oleh penduduk rapat umum, rapat biasa dan demonstrasi besar2an untuk memprotest sikap Belanda yang kolot itu.

(lanjutan besok)

ADI NEGORO

(Copyright „Waspada“).

Penerbitan harian ini diusahakan : Persekutuan „WASPADA“ Medan

Ketua Umum :

MOHAMAD SAID — Medan

Alamat : Pusat Pasar P 126, Medan  
Pentjatak Sjarikat Tapanuli Medan  
Isinja diluar tanggungan pentjatak

# WASPADA

SUARA MERDEKA — HARIAN BANGSA INDONESIA

TATA USAHA :

Djam : 8 — 12 dan 2 — 4  
Pusat Pasar P 126 — Medan  
Harga etjeran f 0.50 selembar  
Langg. f 10.— sebln (ambf sendiri)  
Iklan (advertentie) f 1.— sebaris  
Sedikitnja 1 X muat 5 baris

## PERUNDINGAN POLITIK INDONESIA-BELANDA MINGGU DEPAN

### Pemerintah Interim Senin muka

Djakarta, 4—3.

Pemerintah peralihan buat seluruh Hindia Belanda akan diangkat dan dilantik pada hari Senin, demikian ditumunkan hari ini. Perundingan politik diduga akan dimulai lagi diminggu depan dengan perantaraan Komisi Djasa2 Baik UNO.

Lt. G.G. H.J. van Mook bermaksud berangkat ke Bandung buat merasukan keangkatan wali Negara Djawa Barat yang baru terpilih. Diduga beliau akan mengadakan pedato yang penting di Djakarta dan di Bandung agaknya buat mendjelaskan garis haluan Belanda di kemudian hari berkenaan dengan regim Republik. — (AP).

### Persetudjuan politik dan ekonomi dengan Republik akan ditjari

AMSTERDAM, 5 Maret

Sebelum berangkat ke Djakarta van Vredenburg menandakan bahwa ketika di Djakarta pertama sekali ia akan mengadakan pembicaraan dengan van Mook dan Neher. Kami boleh djadi berbitjara seminggu lamanya. Dan didalam pembicaraan ini kami djuga akan mengadakan perhubungan dengan Dewan2 ketua departemen. Dengan sendirinya kami djuga akan melakukan pembicaraan dengan delegasi. Sudah itu kami akan meneruskan perundingan dengan Republik.

Kami akan berusaha memperoleh persetujuan politik dan ekonomi dengan Republik. Pembicaraan2 itu tentu tidak akan berdjalan dengan lntjir.

### DALIL2 YAMIN DITOLAK

Jogja, 4—3 (Antara).

Mahkamah Tentera Tinggi Republik hari ini menolak dalil2 Mr Mohamad Yamin yang mengatkan Mahkamah tidak berhak buat mengadili perkaranya dan meminta dirinya serta 16 orang teman nja dibebaskan. Mereka didakwa mentjaba melakukan putar-negeri yang dapat digagalkan.

Setelah selesai membatjakan keputusan rapat berkenaan dengan dalil2nya itu, maka Hakim Koesoema Atmadja menerangkan sangat berat bagi dirinya menimbang perkara itu, karena orang2 yang tersangkut dan menjadi pesakitan dipandangnja sebagai saudara2nja didalam perjuangan kebangsaan; tetapi sebagai seorang hakim ia mesti menjalankan keadilan menurut yg ditentukan oleh hukum.

Sewaktu menuturkan ini Hakim Atmadja nampaknja sangat terharu. Kemudian membubarkan persidangan buat dilandjutkan besok, pada waktu mana akan didengeri keterangan saksi2 perihal yg tidakkwakan kepada pesakitan2.

## Republikan Wiranatakoesoemah Wali Negara

BANDUNG, 4 Maret.

Seorang pegawai tinggi Republik, Raden Moeharim Wiranatakoesoemah hari ini telah terpilih menjadi wali Negara Djawa Barat. Beliau beroleh kemenangan dgn majoriti yang tipis yaitu 54 lawan 46 suara.

Raden Wiranatakoesoemah pada waktu ini menjadi ketua dari Dewan Pertimbangan Agung dari Pres. Soekarno dan kini berdiri am di Jogja, ibukota Republik. Dalam kabinet Soekarno yang pertama mendjabat Menteri. Dalam negeri, yaitu demi Republik diproklamirkan dalam bulan Agustus 1945.

Terpilihnja seorang Republikan tidak menganehkan kepada para hadirin yang menjenguk dimukamar Djawa Barat III yang masih berlangsung di Bandung, dan yang memilih seorang wali negara baru. Mukhtar ini telah diakui dengan resmi oleh Pemerintah Hindia-Belanda sebagai parlemen sementara dari negara baru Djawa Barat, dan sebagai parlemen berkeadilan mengangkat seorang wali negara.

Dari permulaan persidangan telah njata yang Wiranatakoesoemah dan tjalon yang seorang lagi, Hilman Djajaningrat, mempunyai kans 50—30.

Tiga kali diadakan undian baru diperoleh majoriti yang sah Djura

### ATJARA2 JG. TERPENTING

Aliran politik yg akan menentukan posisi pem. sementara  
Dasar kedudukan Republik dalam pemerintah sementara

DJAKARTA, 4 Maret (Chas „Wsp“).

KALANGAN2 POLITIK JANG MENGETAHUI MENERANGKAN KEPADA KORESPONDEN KITA DI DJAKARTA BAHWA AGENDA TERPENTING JANG PERTAMA DIKEMUKAKAN DALAM PERUNDINGAN POLITIK JANG AKAN DATANG IALAH SOAL PEMERTUKAN PEMERINTAH INTERIM.

MENURUT KALANGAN JANG MENGETAHUI, PIHAK BELANDA TELAH MEMPUNJAI RENTJANA SENDIRI UNTUK MENJUSUN PEMERINTAH INTERIM INI. DIANTARANJA ORANG JANG DUDUK DALAM FEDERALE RAAD AKAN DIBERI DJABATAN PIMPINAN DEPARTEMEN2 DAN SELEBIHNJA BUAT REPUBLIK.

PEMERINTAH REPUBLIK DIDUGA AKAN MENUNTUT SUPAJA DALAM PERUNDINGAN POLITIK ITU DAPAT DIJAPAI SUATU ATURAN2 POLITIK JANG MENENTUKAN POSISI PEMERINTAH INTERIM DAN DASAR2 KEDUDUKAN REPUBLIK DALAM PEMERINTAHAN INTERIM TERSEBUT.

### V. VREDENBURGH PULANG OPTIMIS

Terlebi dahulu Reuter mewartakan dari Djakarta bahwa pembicaraan persoonlijk antara wakil Belanda dan Republik diduga akan membuka taraf perundingan di Djakarta.

Pembicaraan ini akan mengenai persetujuan politik dan yang akan didasarkan kepada ke 18 persetujuan politik yang telah ditanda tangani tanggal 17 Djanuari seketika gentjatan senjata telah dilaksanakan, kata kalangan2 ini. Pembicaraan ini diadakan oleh wakil2 dari Komisi Djasa2 Baik.

Pihak2 yang berunding diduga Jonkheer van Vredenburg dari pihak Belanda dan Mr. Mohd. Roem dari Republik. Pembicaraan akan dimulai lebih kurang 10 hari sebak Jhr. van Vredenburg pulang dari negeri Belanda.

Seorang djuru bitjara Belanda mengatakan bahwa Jonkheer van Vredenburg telah berangkat ke negeri Belanda untuk berunding dengan Pemerintah Belanda.

Kalangan2 yang mengetahui dari pihak Belanda menduga bahwa salah satu pokok pembicaraan yang akan timbul dalam pembicaraan antara wakil wakil setjara persoonlijk ini ialah status Republik sebelum di tjapai persetujuan politik. Republik kini dengan perhubungan luar negerinya telah menimbulkan perasaan kurang enak dan menghalangi kemajuan perhubungan dan yang hanya dapat menjadi sitawar sidingin adalah pelaksanaan dari gentjatan senjata.

### Kedaulatan

Pihak Belanda hendak memperoleh satu djawaban yang terang dari Republik berkenaan dengan enam dasar2 politik tambahan yang telah ditanda tangani. Pasal2 ini mengatkan bahwa pihak Belanda ada dan tetap berdaulat sampai nanti kedaulatan itu diserahkan kepada Indonesia Serikat yang bakal dibangunkan.

Kalangan2 Republik berpendapat hasil dari perundingan tentang soal ini, djika perundingan dilakukan, akan membawa akibat hebat pada pemerintahan Hatta yang baru.

Satu soal yang dikesampingkan oleh Drs. Hatta seketika beliau berbitjara dihadapan Badan Pekerja KNIP — yaitu politiknja.

### Dj Barat

memangltnja“.

Raden Ario Adipati Moeharim Wiranatakoesoemah berumur 60 tahun, dilahirkan di Bandung dan telah memegang berbagai2 djabatan di Djawa Barat. Beliau pernah menjadi regent Bandung dibawah pemerintahan Belanda, dan kemudian menjadi anggota Volksraad.

Selama pendudukan Djepang Wiranatakoesoemah menjadi direktur urusan dalam-negeri dan demi Djepang menjerah dan Republik diproklamirkan langsung menjadi Menteri Dalam-negeri Republik.

Dalam sementara itu ketua Parlemen, Raden Djoearsa, mengangkan ke2egasi dari 3 orang anggota Parlemen buat pergi ke Jogja ba at meminta dengan resmi kepada Raden Wiranatakoesoemah menterima djabatan baru dan buat datang ke Bandung selesaknja.

Wali negara baru terpilih itu sudah diketahu pernah mengutjapkan di Jogja yg beliau bersedia datang ke Bandung „djikalau rakjat

## Nasib pegawai Republik didaerah pendudukan akan dibitjarkan

DJAKARTA, 4 Maret (Chas „Wsp“).

Dari kalangan resmi koresponden kita mendapat keterangan, bahwa delegasi Indonesia telah memajukan kepada Komite Sosial dan Administratif dari perundingan Indonesia — Belanda, supaya soal kedudukan pegawai Republik didaerah pendudukan dimasukkan kedalam agenda perundingan nanti, supaya kedudukannya dapat dipisahkan.

Ketika Wakil Presiden Hatta mengundjungi Dr. van Mook, Wakil Presiden telah meminta kepada Dr. van Mook supaya pegawai2 Republik itu diambil bekerja dalam djabatant2 dan dinas2 Belanda dengan kedudukan sebagai pegawai Republik yang „ter beskikking gesteld“ pada pemerintah Belanda selama belum ada penyelesaian politik, atau selama belum ada kepastian de facto Republik belum kembali kederaah2 yang diduduki Belanda sekarang. Dr. van Mook prinsipiel tidak keberatan tentang ini, tetapi beliau memegang teguh pendiriannya, bahwa yang mungkin diambil dalam dinas2 Belanda itu adalah yg dipandang tjakap oleh dinas2 Belanda itu.

Maksud Wakil Presiden bertindak demikian, ialah supaya djangan sendiri2 (individual) pegawai2 itu meninggalkan posnja.

Selanjutnja kalangan2 resmi itu menerangkan, bahwa djika nanti sudah didapat persetujuan tentang kedudukan pegawai2 Republik, oleh kedua belah pihak de-

### PANITYA PERHUBUNGAN

Djakarta, 4-3 (Chas „Wsp“)

Untuk kepentingan perundingan delegasi2 Indonesia-Belanda, telah dibentuk satu Panitia Perhubungan. Panitia ini mempunyai kewajiban untuk mengusahakan terbukanya perhubungan antara daerah Republik (Jogjakarta) dan Belanda (Djakarta), terutama perhubungan Kereta Api untuk pengangkutan2 anggota2 delegasi dan orang2 yang dipergunakan.

Baru2 ini panitia tersebut telah mengadakan pertemuan digedung Indonesia Serikat Djakarta, dan telah terdapat persetujuan prinsipiel, bahwa perhubungan kereta api tersebut akan dibuka sedapat mungkin pada tanggal 15—3 jad.

Tempo ini akan dipergunakan untuk memperbaiki beberapa djembatan2 yang hancur didaerah2 demarjasi dan sekitarnya yang perlu diperbaiki.

Kedudukan Panitia tersebut terpisah dari delegasi Indonesia dan Belanda, serta anggota2 panitya2 itu terdiri dari ahli2 dan pembesar2 dinas2 perhubungan dari pihak Republik dan Belanda.

### Kalau W. Foote bitjara . . .

PERLU IMPORT BARU

BISA EXPORT

Walter Foote, bekas konsol djenderal Amerika Serikat di Djakarta menerangkan, bahwa pengiriman lada, getah, timah dan minyak dari Indonesia bertambah, akan tetapi untuk memulai lagi setjara besar2an perlu import dari pakain, obat2an dan lain barang yang perlu diperhebat. Tuan Foote menerangkan dalam satu konferensi pers di New York bahwa orang Indonesia tidak mempunyai perhatian terhadap uang (?), akan tetapi hanya memikirkan apa yang mereka bisa belikan dengan uang, dan mereka tidak hendak bekerja dengan sekuatnja sampai mereka nanti bisa membeli apa yang mereka perlukan.

Dia sangat optimis, biarpun begitu, dalam pandangan umum dengan memberikan alasan akan export sebelum perang lebih banyak dari import perbandingan 4 lawan 1. „Djika export bisa ditambah setengah kali lebih banyak dari sebelum perang, maka akan dapat dibangunkan perbandingan dollar, yang sebaliknya bisa pula dipergunakan untuk pembangunan selanjutnja yang bisa menambah djumlah export“.

Dia mengatakan bahwa maskapai getah tidak begitu khawatir melihat getah syntetis sebegaimana yang saja djaga“.

Maskapai2 getah biasa dan syntetis pertjaja, katanya yang kedua matjam getah ini ada gunanya masing2. Umpamanya, katanya ban motor yang paling bagus dibikin dari getah biasa sedang tube getah dibikin dari getah syntetis. Di Indonesia djuga banyak kopra, kata Foote, akan tetapi soal pentjautanja dapat diatasi dengan pengiriman truck kesana“.

— (Reuter).

## SEKALI MENGGEBU

Kawat partai Demokrat Curacao melajang ke Unie Pan Amerika dan UNO

WILLEMSTAD, 5 Maret.

Setelah didalam pertemuan raksa oleh partai demokrasi dari Curacao dilakukan pembicaraan terhadap hadirin oleh anggota2 delegasi dari Antillen Belanda yang meninggalkan sidang media bundar maka dikirimkan kawat kepada Unie Pan Amerika di Washington dan Lembaga Bangsa2 di Lake Success.

Kejada Unie diminta supaya memberikan bantuan sokongan dari negara2 Amerika untuk memperoleh hak demokrasi untuk penduduk Curacao.

### KEADAAN KERUSAKAN „HINDIA BELANDA“

Djakarta, 3—3 (Chas „Wsp“).

Dalam keterangan menteri negara Gotzen kepada Tweede Kamer yang keterangan itu tidak (belum) diisarkan surat2 kabar Indonesia diterangkan, bahwa Pemerintah Hindia Belanda baru dapat memperbaiki exportnja setingkat seperti sebelum perang dalam waktu 5 tahun lagi, sedjak sekarang Kerugian2 terbesar selama pendudukan Djepang ditambah lagi dengan akibat perang kolonial Belanda. Djumlah kerugian langsung, tidak dengan dihitung besarnya penghasilan dari perindustrian perkebunan, lk. 1.000.000.000 rupiah, menurut harga sebelum perang.

Anda kata tidak ada perang kolonial, dan onderneming2 yg ada didaerah Republik dengan segera dapat diperbaiki, maka perbaikan karena kerusakan selama pendudukan Djepang sudah sudah memakan waktu kira2 sampai tahun 1950. Akan tetapi karena perang kolonial, kerugian karena kerusakan makin bertambah besar.

Kerusakan2 dari alat2 yang ditimbulkan oleh pendudukan Djepang dan oleh perang kolonial ditaksir ada sedjumlah 325.000.000 rupiah.

Dia mengangkan bahwa dalam taraf perundingan didalam diluar konferensi media bundar hal ini sangat menedihkan terutama sekarang setelah minggu jang lalu njata bahwa Tweede Kamer akan membitjarkan perubahan peraturan negara, peraturan mana setelah dilakukan pembicaraan dengan delegasi2 dibeberapa negara rupanya memenuh keinginan Curacao.

— (ANP).

